



Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi

Novita Sari¹, Agus Kurniawan², Nurhayati³

^{1,2,3} UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame,
Kota Bandar Lampung, Lampung

Korespondensi penulis: nta03039@gmail.com

Abstract. *The effort to implement good governance reflects the government's desire to apply good governance in the administration of regional government. A good government SPI can also influence the actions and activities carried out continuously by the leadership and all staff to provide adequate assurance of the achievement of organizational goals. This research was conducted to determine the effect of good governance on the performance of local government, to determine the effect of the internal control system on the performance of local government, to determine whether the internal control system moderates the effect of good governance on the performance of local government and to understand the Islamic Economic perspective on the effect of good governance on the performance of local government in the Department of Industry and Trade of Lampung Province. The method used employs a quantitative approach. The population in this study consists of all employees of the Department of Industry and Trade of Lampung Province, and the sample taken was 46 respondents using the purposive sampling technique. In this study, it is shown that poor governance will not affect the performance of the regional government at the Department of Industry and Trade of Lampung Province. But the higher the internal control system in the Department of Industry and Trade of Lampung Province, the more it will be able to improve the performance of the regional government, and the higher the internal control system in the Department of Industry and Trade of Lampung Province, the more it will strengthen the influence of good governance on the performance of the regional government.*

Keywords: *Good Governance, Performance, Local Government, Internal Control System, Employees.*

Abstrak. Upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan upaya yang mencerminkan keinginan pemerintah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. SPI pemerintah yang baik juga dapat mempengaruhi tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh staf untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah, untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah, untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh *good governance* dan untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah pada dinas perindustrian dan perdagangan provinsi lampung. Metode yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dinas perindustrian dan perdagangan provinsi lampung dan sampel yang diambil sebanyak 46 responden dengan memakai teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tata kelola yang baik tidak akan berpengaruh bagi kinerja pemerintah daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Tetapi semakin tinggi sistem pengendalian internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung akan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan semakin tinggi sistem pengendalian internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung maka juga akan memperkuat pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci : *Good Governance, Kinerja, Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Karyawan.*

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Tidak diragukan lagi bahwa pertumbuhan populasi akan membutuhkan pemerintahan dan layanan yang baik untuk seluruh masyarakat. Perkembangan hubungan pemerintah dan masyarakat sejak era reformasi telah melahirkan konsep pemerintahan yang baik di Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Perubahan sistem pemerintahan daerah ditandai

dengan ditetapkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah mempunyai tugas membantu kepala pemerintahan daerah dan wakil rakyat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Evaluasi kinerja pemerintah akan menjadi fokus bagi banyak pemangku kepentingan. *Good Governance* adalah sistem tata kelola yang baik yang dievaluasi berdasarkan sejumlah indikator tertentu. Secara umum, indikator kinerja pemerintah yang umum dievaluasi adalah transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi. Konsep ini dapat digunakan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh dunia usaha. Tata kelola yang baik berperan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan di masa depan.

Faktanya, istilah “pemerintahan” telah ada dalam literatur ilmu ekonomi dan politik selama sekitar 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi ini sekitar 125 tahun yang lalu. Namun hingga saat ini tata kelola hanya digunakan dalam kaitannya dengan pengelolaan organisasi bisnis dan perguruan tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan baru mengenai tata kelola telah muncul ketika berbagai lembaga keuangan internasional mencari tata kelola yang tepat dalam berbagai program bantuan mereka. Di kalangan ahli teori dan praktisi administrasi publik di Indonesia, istilah “good governance” diartikan sebagai pemerintahan yang dapat dipercaya, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, dan lain-lain, meskipun ada juga yang lebih dekat menerjemahkannya sebagai “pemerintahan yang bersih.

Sejumlah asumsi resmi tentang penyediaan layanan pemerintah daerah telah menjadi perhatian publik. Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya praktik *good government* dengan melakukan berbagai perubahan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan bermuara pada terwujudnya praktik *good government*. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, yang dilakukan di hampir setiap departemen pemerintah. Kinerja merupakan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis. Saat ini, penganggaran dan pengelolaan pemerintah belum memenuhi harapan masyarakat

Sangat strategis untuk memberi prioritas pada pembenahan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik. Kinerja aparatur pemerintah daerah dipilih sebagai langkah awal karena aparatur pemerintah daerah secara tradisional memposisikan dirinya bukan sebagai aparatur sipil negara namun sebagai penguasa yang membutuhkan pelayanan. Hal ini karena telah mendorong berkembangnya aspirasi dan tradisi masyarakat. Selanjutnya,

Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan harapan baru untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah daerah bertanggung jawab atas kinerja yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk menanggapi masyarakatnya dan memberikan pelayanan terbaik.

Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu program atau pelayanan pemerintah daerah berhasil atau tidak adalah dengan melihat apa yang disebut capaian kinerja. Capaian kinerja adalah jumlah keberhasilan yang telah dicapai oleh anggota dalam mencapai sasaran organisasi. Pengukuran kinerja pemerintah adalah cara untuk mengetahui seberapa baik kinerjanya. Sangat penting untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Kinerja pemerintah dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti perencanaan, investasi, dan kinerja. Pengukuran ini juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa berhasil pemerintah daerah melaksanakan tujuan, visi, dan tujuan tersebut. Mereka juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi perangkat daerah (OPD).

Alasan obyektif peneliti memilih judul ini adalah otonomi daerah. Upaya untuk mencapai “pemerintahan yang baik” atau menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia masih berjalan sesuai jalur atau belum. Upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan upaya yang mencerminkan keinginan pemerintah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini tercermin dalam indikator pencapaian upaya penegakan hukum, transparansi dan partisipasi. Dalam konsep pemerintahan yang baik, negara bertugas memberikan pelayanan untuk kesejahteraan rakyatnya melalui sistem peradilan yang baik dan pemerintahan yang bertanggung jawab sehingga urusan pemerintahan dan pembangunan terselenggara secara efisien dan efektif. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, yang memerlukan pembagian tanggung jawab yang tepat dalam pemerintahan. Secara subjektif, penulis memilih judul ini karena ada banyak literatur yang mendukungnya. Selain itu, pembahasan ini sangat relevan dengan bidang yang dipelajari penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Salah satu alasan mengapa peneliti memilih sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi adalah karena SPI pemerintah yang baik dapat mempengaruhi tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh staf untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengambil judul “Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan

Sistem pengendalian internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Dinas perindustrian dan perdagangan provinsi lampung)”

2. KAJIAN TEORITIS

Good Governance

Bank Dunia mendefinisikan tata kelola yang baik sebagai praktik manajemen yang baik dan bertanggung jawab yang mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, menghindari salah alokasi sumber daya investasi, mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menegakkan disiplin fiskal, dan menciptakan kerangka hukum dan kebijakan untuk pertumbuhan kegiatan bisnis. Menurut Lembaga Transparansi Indonesia (MTI), kunci terpenting untuk memahami tata kelola pemerintahan yang baik adalah memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, tolok ukur kinerja pemerintah ditetapkan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1) peran serta masyarakat, 2) supremasi hukum, 3) transparansi, 4) kepekaan pemangku kepentingan, 4) orientasi konsensus, 5) ketidakberpihakan, 6) efektivitas dan akuntabilitas, dan 7) visi strategis. Semua atribut dan prinsip pemerintahan yang baik ini saling memperkuat dan saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri.

Dalam mengembangkan praktik tata kelola yang baik, pemerintah perlu mengadopsi dan menerapkan kebijakan yang efektif. Mengingat luasnya masalah, kompleksitas setiap isu, dan terbatasnya sumber daya serta kapasitas lembaga pemerintah dan nonpemerintah untuk melaksanakan reformasi pemerintah, pemerintah perlu membuat keputusan strategis untuk mulai membangun praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Pembaharuan praktik tata kelola pemerintahan yang dalam banyak hal masih bercirikan tata kelola pemerintahan yang buruk menjadi tata kelola pemerintahan yang baik dapat terjadi secara bertahap, sejalan dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, sepanjang perubahan tersebut secara konsisten mengarah pada terwujudnya ketiga ciri praktik tata kelola pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas. Salah satu pilihan strategis dalam pengembangan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang bercirikan nilai-nilai yang telah lama melekat dalam tata pemerintahan yang baik.

Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Instrumen Sipil Nasional (ASN), tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin penilaian Instrumen Sipil Nasional (ASN) secara objektif. Oleh karena itu, sangat penting bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung untuk melakukan penilaian kinerja guna

mengetahui apa yang dimaksud dengan “tingkat kinerja” pegawai yang tinggi dan apa yang dimaksud dengan “tingkat kinerja” yang tinggi dalam hal produktivitas kerja.

Kinerja suatu instansi pemerintah daerah menggambarkan tingkat keberhasilannya dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijakan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana strategis organisasi. Pengertian kinerja instansi pemerintah daerah adalah gambaran tingkat keberhasilan penyelenggaraan kegiatan/program/kebijakan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis organisasi. Dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja instansi adalah gambaran tingkat kinerja di bidang pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan oleh pengguna anggaran keuangan organisasi publik. Langkah selanjutnya setelah penganggaran adalah pengukuran kinerja untuk mengevaluasi kinerja dan akuntabilitas organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visinya.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang dirancang untuk membantu manajer publik mengevaluasi keberhasilan strategi mereka melalui ukuran finansial dan non-finansial. Tujuan dari sistem pengukuran kinerja adalah untuk mengomunikasikan strategi secara lebih efektif. Seimbangkan pengukuran kinerja finansial dan nonfinansial untuk melacak kemajuan dalam mencapai strategi Anda. Memahami kepentingan manajer tingkat menengah dan bawah dan memotivasi mereka untuk mencapai kesesuaian tujuan sebagai sarana pencapaian kepuasan berdasarkan pendekatan individu dan kemampuan kelompok yang rasional.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 merupakan suatu proses terpadu dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh manajemen dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan perusahaan melalui kegiatan operasional yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, perlindungan aset pemerintah, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal juga dapat diartikan sebagai sistem yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset perusahaan, memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendukung kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang tercapainya tujuan yang terkait dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal adalah proses yang diterapkan untuk memastikan keamanan yang memadai.

Semua organisasi swasta dan publik berhak memiliki nilai, seperti yang ditunjukkan oleh kemampuannya untuk menetralsir ancaman dan mengeksploitasi peluang organisasi. Menetralsir ancaman terhadap suatu perusahaan berarti mengidentifikasi risiko yang mengancam kelangsungan bisnis. Organisasi perlu membangun tata kelola organisasi yang baik, yang disebut tata kelola.

Kemampuan untuk membangun tata kelola yang baik ditunjukkan oleh kemampuan organisasi untuk mengelola asetnya secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pimpinan organisasi swasta maupun publik mempunyai tugas untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan organisasi agar tujuan organisasi tercapai.

Persyaratan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi merupakan tugas Kepala Tata Kelola Perusahaan (TCWG). Pihak-pihak tersebut adalah Komisaris, Direktur, Manajemen Senior dan Departemen Audit Internal. Tata kelola perusahaan yang baik dicirikan oleh suatu organisasi yang mempunyai pengendalian organisasi (perusahaan) dan bisnis, dengan setiap transaksi dikendalikan, dan adanya sistem pemeriksaan dan keseimbangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif bersifat ilmiah karena dilakukan secara konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah. Metode kuantitatif melibatkan studi populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan alat penelitian, dan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif atau statistik. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif karena bertujuan untuk memverifikasi hipotesis yang dikembangkan menggunakan angka yang diperoleh dari perhitungan statistik.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pemerintah yang berjumlah 89 pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Lampung. Menurut Winarno, apabila jumlah populasi kurang dari 100 maka sampel yang diambil minimal 50% dari populasi. Berdasarkan definisi di atas, kita dapat mengatakan bahwa sampel survei secara bersama-sama mewakili 52% populasi, yang berjumlah 46 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket (kuesioner) dan Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert (1, 2, 3, 4, 5). Skala Likert adalah survei pilihan ganda dengan lima kemungkinan tanggapan untuk setiap pernyataan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Kuesioner 1 (X)

Pernyataan	r – Hitung	r – Tabel	P (Sig.)	Keterangan
X1	0,848	0,2907	0,000	Valid
X2	0,828	0,2907	0,000	Valid
X3	0,813	0,2907	0,000	Valid
X4	0,663	0,2907	0,000	Valid
X5	0,782	0,2907	0,000	Valid
X6	0,782	0,2907	0,000	Valid

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk vaiabel *Good Governance* (X) memiliki status valid, Karena nilai r – Hitung > r – Tabel sebesar 0,2907.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Kuesioner 2 (Y)

Pernyataan	r – Hitung	r – Tabel	P (Sig.)	Keterangan
Y1	0,664	0,2907	0,000	Valid
Y2	0,662	0,2907	0,000	Valid
Y3	0,702	0,2907	0,000	Valid
Y4	0,701	0,2907	0,000	Valid
Y5	0,736	0,2907	0,000	Valid
Y6	0,721	0,2907	0,000	Valid

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk vaiabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) memiliki status valid, Karena nilai r – Hitung > r – Tabel sebesar 0,2907.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Kuesioner 3 (M)

Pernyataan	r - Hitung	r – Tabel	P (Sig.)	Keterangan
M1	0,570	0,2907	0,000	Valid
M2	0,806	0,2907	0,000	Valid
M3	0,700	0,2907	0,000	Valid
M4	0,774	0,2907	0,000	Valid
M5	0,698	0,2907	0,000	Valid
M6	0,680	0,2907	0,000	Valid

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk vaiabel Sistem Pengendalian Internal (M) memiliki status valid, Karena nilai r – Hitung > r – Tabel sebesar 0,2907.

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 1 (X)

Jumlah Pernyataan	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
6	0,877	0,6	Reliabel

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk vaiabel *Good Governance* (X) memiliki status Reliabel. Jadi, dianggap andal untuk dijadikan instrumen dalam penelitian ini.

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 2 (Y)

Jumlah Pernyataan	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
6	0,789	0,6	Reliabel

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk vaiabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y) memiliki status Reliabel. Jadi, dianggap andal untuk dijadikan instrumen dalam penelitian ini.

Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 3 (M)

Jumlah Pernyataan	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
6	0,785	0,6	Reliabel

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk vaiabel Sistem Pengendalian Internal (M) memiliki status Reliabel. Jadi, dianggap andal untuk dijadikan instrumen dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang baik apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka data tersebut dapat dikatakan normal. Uji normalitas pada penelitian ini dinyatakan pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Hasil Uji Normalitas

Sampel	asyp sig	Keterangan
46	0,200	Bebas Normalitas

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2025.

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa asymp sig sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa $0,200 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Metode uji multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Inflation Factor (VIF) pada model regresi, jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa suatu model regresi bebas dari multikolinieritas.

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
Good Governance	0,567	1,763	Bebas Multikolinieritas
Sistem Pengendalian Internal	0,567	1,763	Bebas Multikolinieritas

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel memperoleh nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10,00$ maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel diatas tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

Tabel 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Good Governance	0,00	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Internal	0,00	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2025.

Berdasarkan hasil uji diatas seluruh variabel didapat nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga dapat ditarik Kesimpulan terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokolerasi

Tabel 10 Hasil Uji Autokolerasi

Sampel	Nilai Durbin Watson
46	2,007

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2025.

Diketahui

$$d = 2,007$$

$$d U = 1,667$$

$$4-dU = 4-1,667 = 2,333$$

Jika $dU < d < 4-dU$ maka hipotesis nol diterima yang artinya tidak terjadi auto korelasi.

Berdasarkan hasil diatas $1,667 < 2,007 < 2,333$ maka dapat disimpulkan hipotesis nol diterima yang artinya tidak terjadi auto korelasi.

Uji regresi linear sederhana

Tabel 11 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	11.711	3.531		3.316	.002
	Good Governance	.174	.147	.206	1.183	.243
	Sistem Pengendalian Internal	.371	.182	.355	2.041	.047

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2025.

Berdasarkan output SPSS diatas, maka dapat dirumuskan persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

$$Y = 11,711 (\alpha) + 0,174 (X) + \varepsilon \text{ (Good Governance)}$$

$$Y = 11,711 (\alpha) + 0,182 (X) + \varepsilon \text{ (sistem pengendalian internal)}$$

Bermakna:

- *Constant* = 11,711 artinya apabila good governance itu konstan atau tetap, maka Kinerja sebesar 11,711.
- Koefisien arah regresi = 0,174 (positif) artinya apabila good governance meningkat satu satuan, maka Kinerja juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,174.
- Koefisien arah regresi = 0,182 (positif) artinya apabila sistem pengendalian internal meningkat satu satuan, maka Kinerja juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,182.

Uji Hipotesis

Uji T

- X terhadap Y = nilai T hitung < T tabel atau $1,183 < 1,679$ yang artinya tidak berpengaruh dan nilai signifikansi $0,243 > 0,05$ yang artinya tidak signifikan sehingga H1 ditolak.
- M terhadap Y = nilai T hitung > T tabel atau $2,041 > 1,679$ yang artinya berpengaruh positif dan nilai signifikansi $0,047 < 0,05$ yang artinya signifikan sehingga H2 diterima.

Tabel 12 Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.286	3.557		5.985	.000
	Good Governance	-.255	.291	-.300	-.874	.387
	gg dengan spi	.017	.007	.797	2.322	.025

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2025.

Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara good governance dengan sistem pengendalian internal sebesar 0,025 ($<0,05$) maka berkesimpulan bahwa variabel sistem pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh good governance terhadap variabel kinerja karyawan sehingga H3 diterima.

Uji R

Tabel 13 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.514 ^a	.264	.230	2.466

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2025.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel diatas maka diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,230 (23,0%). Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 23,0%, sedangkan sisanya sebesar 77,0% ($1 - 0,230$) dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian yang berjudul **“Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung”** adalah sebagai berikut:

- *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tata kelola yang baik tidak akan berpengaruh bagi kinerja pemerintah daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi sistem pengendalian internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung maka akan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

- sistem pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh *good governance* terhadap variabel kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi sistem pengendalian internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung maka akan memperkuat pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.
- *Good Governance* dalam perspektif Islam yaitu menggunakan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada:
 - Penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan rohaniyah sebagaimana yang disimbolkan pada shalat.
 - Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan dengan zakat.
 - Penciptaan stabilitas politik yang dipahami dari amar ma'ruf dan nahi munkar.
 - Sudut pandang ekonomi Islam dalam kaitannya dengan kinerja dalam Islam menggaris bawahi setelah manusia sebagai pelaku ekonomi mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada sebagai media untuk kehidupan di dunia ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini dan simpulan yang telah disajikan maka peneliti menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- Bagi Instansi
Diharapkan dapat melakukan evaluasi berkala atas kinerja karyawan dan Diharapkan instansi terkait, stakholder dan unsur yang berkewajiban dalam hal ini untuk memperhatikan faktor-faktor lain seperti sarana, prasarana hingga pengembangan skill lainnya yang dapat berkontribusi terhadap kinerja pegawai sebagai abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.
- Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dalam kegiatan belajar mengajar ataupun dalam melakukan penelitian.
- Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode wawancara serta angket terbuka dalam penelitian, agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan sebenarnya, Disamping itu juga perlu menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai Pemerintah Daerah dan Responden yang digunakan dalam penelitian selanjutnya sebaiknya lebih luas karena pada penelitian ini sampelnya masih sempit cakupannya.

DAFTAR REFERENSI

- AgustiningTyas, V. E., Tyasari, I., & Yogivaria, D. W. (2020). Pengaruh good governance, sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada OPD Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4458>
- Anggraini, A. B., & Idayati, F. (2022). Pengaruh good governance dan pengendalian internal terhadap kinerja organisasi sektor publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(1), 1–18. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4872/4875>
- Aulia, A. R., & Yulianti, A. L. (2019). Pengaruh city branding ‘a land of harmony’ terhadap minat berkunjung dan keputusan berkunjung ke Puncak, Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), 67–71. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp67>
- Dhaezan, H. S., & Wahidahwati. (2021). Pengaruh good governance, komitmen organisasi dan pengawasan internal terhadap kinerja OPD: Budaya organisasi sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–25.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gajah Mada University Press.
- Faiz, M. A. S., & Andayani, S. (2022). Pengaruh independensi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan pemahaman good governance terhadap kinerja auditor pemerintah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 656–670. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.599>
- Hendaris, I. R., & Budi. (2022). Pengaruh penerapan good government governance dan pengawasan internal terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9, 2869–2879.
- Mahyuddin, & Sahri. (2022). Implementasi prinsip-prinsip good governance dan dampaknya terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. *JMM UNRAM - Master of Management Journal*, 11(4), 346–357. <https://doi.org/10.29303/jmm.v11i4.755>
- Maimanah, A., & Nurdiono. (2024). Pengaruh penerapan prinsip-prinsip good government governance terhadap kinerja pegawai bidang keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen*, 3(2), 178–202.
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i2.34>
- Munifah. (2023). *Pengendalian internal sistem informasi*. Penerbit Stekom. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/download/447/472>
- Omposunggu, S. G., Salomo, R. V., & Universitas Indonesia. (2019). Analisis pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 5(1), 78–86.
- Pratama, H. P., Teniro, A., Efendi, M., Zainudin, & Zunafriesma, N. (2024). Pengaruh variabel good governance terhadap kinerja aparatur. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 8(1), 31–47. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v8i1.5500>

- Purba, R. B. (2023). *Teori akuntansi: Sebuah pemahaman untuk mendukung penelitian di bidang akuntansi* (Cet. ke-7). Merdeka Kreasi.
- Safrin, M., & Pratiwi, E. T. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan good government governance sebagai variabel intervening (Studi pada BPKAD Kabupaten Buton Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UM Buton*, 3(2), 14–34. <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/download/2058/1099/>
- Saputro, G., & Efendi, D. (2019). Pengaruh pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai Kecamatan Tambaksari. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(9), 1–16. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4171>
- Sarwoko, H. (2020). *Model penilaian efektivitas satuan pengawas intern (SPI)*. UM Jakarta Press.
- Susilawati, R. (2020). Pengaruh konsep pelayanan terhadap keputusan pembelian dan tingkat pendapatan pada masa sebelum, awal dan new normal pandemi (Studi komparasi pada café-café di Minggir Yogyakarta). *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 15(2). <https://doi.org/10.51277/keb.v15i2.76>
- Tuhumury, Y., & Wance, M. (2020). Membangun good governance dalam pemanfaatan keuangan desa. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(1), 37–45. <https://doi.org/10.24905/igj.v3i1.1463>
- Welly, W. (2021). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(1), 133–145. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i1.5600>
- Yaya, R., & Ramadhani, N. (2024). Determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6064>
- Yudiantari, I. G. A. N., & Yasa, G. W. (2023). Pengungkapan corporate social responsibility dan nilai perusahaan dengan good corporate governance sebagai pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(12), 3202–3219. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i12.p07>